

PELUANG DAN TANTANGAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM BIDANG POLITIK-KEAMANAN DI ASEAN PADA KRISIS POLITIK MYANMAR TAHUN 2021

Angga Nurdin Rachmat¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Indonesia has credibility in carrying out its leadership role in the political-security sector in ASEAN. The political crisis that occurred in Myanmar due to a military coup in early 2021 raised concerns that it would have an impact on regional stability and ASEAN solidity. This reality makes researchers question what are the hopes and challenges of Indonesia in carrying out political-security leadership in ASEAN in the political crisis in Myanmar? This research was conducted with a qualitative design using secondary data from various literatures. This study finds that in responding to the crisis that occurred in Myanmar, Indonesia is faced with hopes for ideas and efforts that are always in helping to find solutions as part of the implementation of leadership in the security-politics field that comes from free-active foreign policy, transition experience democracy and capabilities. But on the other hand, Indonesia must also be faced with challenges that must be faced in the capacity to carry out political-security leadership originating from the ASEAN Way, rejection of the people of Myanmar and the inconsistency of human rights issues as well as the consolidation of domestic politics in responding to the crisis. Therefore, Indonesia still has to engage in constructive engagement through strengthening its democracy and human rights agenda and prioritizing non-megaphone diplomacy as part of efforts to help Myanmar out from the political crisis.

Keywords: *Military coup, constructive engagement, free-active, democracy.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan kawasan menjadi karakter yang ditampilkan oleh Indonesia sejak kemerdekaannya. Karakter ini tidak hanya terkait dengan aspek geografis serta kesejahteraan semata namun juga dari pandangan serta keberhasilan pemimpin Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dalam

berbagai bidang (Thompson, 2015, p. 34). Karakter ini diperkuat saat ASEAN terbentuk dengan visi yang senantiasa dipelihara oleh Indonesia untuk senantiasa memperkuat peran kepemimpinan melalui organisasi kawasan tersebut. Penguatan peran Indonesia akan terkait dengan kemampuan untuk mempengaruhi arah kerja sama ASEAN yang lebih positif dan konstruktif melalui prakarsa dan rekomendasi (Direktorat Kerja Sama ASEAN, 2014, p. 3). Kapabilitas Indonesia dalam menengahi konflik seperti yang terjadi antara Thailand-Kamboja (Dewi, 2013), Laut Tiongkok Selatan (Djalal, 2001; Raharjo, 2014) hingga kontribusi dalam gagasan demokrasi dan HAM di ASEAN melalui pembentukan ASEAN *Political-Security Community* (Luhulima, 2010, p. 29). Gagasan mengenai APSC menjadi menarik seiring dengan keinginan Indonesia menjadi motor bagi demokratisasi di negara anggota ASEAN ditengah kenyataan bahwa sebagian besar negara anggota ASEAN masih menjadikan demokratisasi sebagai isu sensitif.

Bagi Indonesia permasalahan Myanmar perlu untuk segera mendapatkan perhatian, khususnya dari ASEAN. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Indonesia menempatkan persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai poros utama dalam penyelesaian permasalahan yang timbul di kawasan (C. Sebastian, 2014, p. 10). Hal ini tercermin dari bagaimana Indonesia menggunakan *constructive engagement* sebagai pendekatan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Myanmar pada masalah demokratisasi di negara tersebut (Aryani, 2019). Indonesia melalui pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda menekankan ASEAN untuk melanjutkan dialog dengan menempatkan Myanmar sebagai bagian dari keluarga (Acharya, 2012), dibandingkan dengan penjatuhan sanksi seperti yang disuarakan oleh Malaysia maupun negara lain di luar ASEAN. Meskipun demikian permasalahan yang terkait dengan dinamika politik domestik di Myanmar masih terus berlangsung dimana pada tahun 2021 Kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan Aun San Suu Kyi memunculkan kekhawatiran baru terkait stabilitas kawasan. Kudeta yang terjadi di Myanmar

menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian kawasan serta potensi adanya intervensi dari pihak eksternal. Tidak hanya sampai disana kondisi berlarut-larut di Myanmar akan melemahkan ASEAN terkait persatuan diantara negara anggota serta relevansi dan sentralitas ASEAN dalam membentuk ketertiban dan hubungan antar negara didalam kawasan (Ryu et al., 2021, p. 5).

Permasalahan kudeta yang memicu instabilitas politik di Myanmar tentu akan kembali menjadi ujian bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Kondisi ini pun semakin mengemuka seiring dengan kritik yang ditujukan terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN terkait dengan kapabilitas kepemimpinan di ASEAN khususnya pasca reformasi merujuk pada stabilitas domestik Indonesia (Smith, 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana harapan dan tantangan terhadap Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan bidang politik-keamanan di ASEAN dalam krisis politik di Myanmar?. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam bidang politik-keamanan di ASEAN pada permasalahan politik domestik di Myanmar. Tulisan ini dikembangkan berdasarkan pada argumen bahwa tantangan terhadap kepemimpinan Indonesia dalam bidang politik-keamanan di ASEAN yang diwujudkan melalui kebijakan terhadap Myanmar hadir dari prinsip ASEAN Ways, Kondisi demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia serta tekanan dari kekuatan di luar kawasan.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN: Sebuah Peran Nasional

Kepemimpinan Indonesia yang mengemuka di ASEAN dalam penelitian ini akan merujuk pada Holsti (1970) sebagai *foreign policy role performance*. *Foreign policy role performance* akan melihat berbagai aspek yang terkait dengan sikap, kebijakan serta tindakan Indonesia dalam menyikapi berbagai

permasalahan yang muncul di dalam kawasan melalui mekanisme ASEAN. Sikap, kebijakan serta tindakan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengambil peran sebagai apa yang disebut oleh Holsti sebagai *regional leader*. *Regional leader* dalam konsepsi peran nasional Holsti (Holsti, 1995) merujuk pada peran untuk memikul tugas serta tanggung jawab tertentu dalam interaksi baik dalam konteks antar negara dalam kawasan maupun dengan negara di luar kawasan. Tugas dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Indonesia di ASEAN tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai negara besar dengan sejarah panjang di Asia Tenggara, peran kepemimpinan di ASEAN diraih melalui penghormatan dan pengakuan sebagai *primus inter pares* dari negara lain baik didalam maupun di luar kawasan.

Pengakuan dan penghormatan terhadap sikap, kebijakan maupun tindakan Indonesia di kawasan membuat Indonesia secara de facto memiliki karakteristik kepemimpinan yang telah diakui baik secara praktis dalam perilaku Indonesia maupun pengakuan dari negara lain di ASEAN maupun dalam berbagai kajian mengenai ASEAN (Acharya, 2001a; Anwar, 1994, 1997, 2018; Caballero-Anthony, 2005; Haacke, 2002; Leifer, 1989; Liow & Emmers, 2005). Kepemimpinan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai kepemimpinan formal sebagai ketua ASEAN, namun lebih kepada kepemimpinan informal pada bagaimana Indonesia memberikan berbagai kontribusi dan komitmen dalam memberikan gagasan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Komitmen Indonesia terhadap ASEAN dapat dilihat dari masih perlunya Indonesia untuk memposisikan ASEAN dalam lingkaran utama konsentrik kebijakan luar negeri Indonesia (Wuryandari, 2008, p. 68). Kepemimpinan Indonesia di ASEAN sendiri telah menjadi dasar serta tujuan yang senantiasa diupayakan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, khususnya pasca Orde Baru.

Kepemimpinan Indonesia menjadi dasar dalam menganalisis peran dan kebijakan Indonesia di ASEAN (B. Roberts et al., 2015; Putra, 2015;

Rattanasevee, 2014). Sejalan dengan tulisan ini yang menempatkan kepemimpinan Indonesia dalam merespon permasalahan kudeta yang terjadi di Myanmar sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Meskipun demikian, kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak bersifat komprehensif dan hanya bersifat sektorial dalam menghadapi permasalahan dalam bidang tertentu di dalam kawasan (Emmers, 2014). Indonesia memiliki karakteristik yang kuat dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan bidang politik-keamanan di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia dalam bidang politik-keamanan dapat dirujuk dari keterlibatan Indonesia dalam meredam berbagai konflik tersebut menunjukkan kredibilitas Indonesia sebagai “*responsible power*”, dimana mampu menjalankan kepemimpinan dengan cara positif (Natalegawa, 2018, p. 20) serta gagasan-gagasan yang terkait dengan demokrasi serta penegakan hak azasi manusia di ASEAN. Bukti gagasan mengenai demokrasi dan HAM tercermin dari inisiasi Indonesia dalam semangat pembentukan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (Widiyanta et al., 2016, p. 38).

Harapan Terhadap Kepemimpinan Indonesia dalam Penyelesaian Krisis Politik di Myanmar tahun 2021.

Krisis politik yang terjadi di Myanmar menjadi sebuah peringatan terhadap pembangunan demokrasi di ASEAN. Kondisi ini disadari sebagai sebuah tantangan besar dalam mewujudkan harapan terhadap Asia Tenggara yang damai dan stabil. Menghadapi tantangan tersebut ASEAN beserta negara anggotanya tentu akan membutuhkan motor untuk mencari solusi terhadap tantangan yang tengah dihadapi terkait dengan krisis politik di Myanmar tersebut. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang selama ini dikenal pada bidang politik-keamanan memunculkan harapan atas berbagai inisiatif serta upaya dalam mengatasi permasalahan krisis politik yang terjadi di Myanmar pasca kudeta diawal tahun 2021 ini. Harapan ini didasarkan pada beberapa aspek yang dapat mendukung Indonesia dalam upaya mengatasi krisis politik

di Myanmar terkait dengan peran kepemimpinan di bidang politik-keamanan yang selama ini ditunjukkan oleh Indonesia di ASEAN yang terkait dengan politik luar negeri bebas aktif, pengalaman transisi demokrasi serta kapabilitas diplomasi yang dimiliki.

a. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Tekanan yang muncul terhadap krisis politik di Myanmar khususnya dari negara di luar kawasan menimbulkan kekhawatiran semakin berlarut-larutnya permasalahan di negara tersebut. Titik acuan Indonesia dalam hal ini adalah untuk memandang bagaimana keberadaan negara-negara besar serta hubungan diantara mereka, dimana Indonesia dapat menjadi penengah untuk tetap menjaga pola hubungan dalam rivalitas ideologi diantara kepentingan-kepentingan yang dibawa (Neumann, 1992: 74). Dengan demikian posisi “netral” Indonesia senantiasa ditujukan sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar secara damai serta menghentikan kekerasan yang terjadi, serta pencapaian kepentingan nasional Indonesia tanpa memihak pada siapapun. Terlebih dalam kasus kudeta di Myanmar reaksi yang ditunjukkan oleh negara-negara di luar kawasan termasuk AS yang menerapkan sanksi ekonomi dan membekukan aset yang berada di AS (bbc, 2021). Sementara Tiongkok lebih bersifat pragmatis terhadap pemerintah yang berkuasa selama kepentingan di negara tersebut tidak mendapatkan gangguan (Lee, 2021). Fakta tersebut menunjukkan bahwa potensi terjadinya benturan kepentingan diantara kekuatan dari luar kawasan dalam permasalahan kudeta di Myanmar akan mengemuka. Dimana masing-masing pihak akan berusaha untuk melihat krisis politik di Myanmar dalam perspektif kepentingan. Sementara Indonesia mampu untuk menunjukkan sikap yang tidak terkait dengan tekanan maupun kepentingan dari pihak manapun. Sikap ini akan mencerminkan kemandirian Indonesia sebagai sebuah negara untuk mengemukakan

pandangannya terhadap penyelesaian krisis politik di Myanmar. Serta sikap untuk menjadi yang terdepan dalam upaya menciptakan solusi damai dalam krisis yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini Indonesia akan menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan interaksi baik dengan pemerintah Myanmar, negara anggota ASEAN lain maupun terkait dengan negara di luar kawasan.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif akan menjadi dasar bagi aksi yang diambil oleh Indonesia dalam menjalankan diplomasi kepada pihak-pihak terkait di Myanmar, baik kelompok pro-demokrasi maupun pemerintahan Junta Militer. Indonesia sebagai *responsible power* senantiasa berusaha untuk mengemukakan berbagai inisiatif yang bersifat proaktif dalam rangka mencegah eskalasi krisis yang terjadi di Myanmar baik secara bilateral maupun melalui mekanisme ASEAN dengan mengedepankan cara-cara dialog dalam menyelesaikan masalah sebagai bangsa yang beradab. Lebih jauh, keterlibatan Indonesia dalam upaya untuk meredakan situasi yang terjadi di Myanmar merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan stabilitas kawasan serta bagian dari identitas Indonesia untuk mempromosikan demokratisasi serta penghormatan terhadap HAM diantara negara-negara di ASEAN termasuk pada pemerintah Myanmar yang tengah menghadapi krisis politik di negaranya. Melalui kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia mampu untuk mendorong pendekatan yang lebih beradab sebagai ciri dari bangsa Indonesia (Fathun, 2018, p. 327). Disamping itu, peran aktif Indonesia merupakan perwujudan keprihatinan terhadap kondisi politik yang ada di Myanmar tanpa membawa muatan kepentingan dari pihak di luar ASEAN.

b. Pengalaman Transisi Demokrasi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki pengalaman dalam transisi politik dari rezim otoriter dibawah pemerintahan Orde Baru ke rezim yang lebih demokratis. Pengalaman demokratisasi dari Indonesia yang telah dilewati oleh Indonesia sebagai model yang dapat dibagikan

dalam menurunkan tensi dalam krisis politik di Myanmar pasca kudeta militer terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya memilih wakil di Dewan Perwakilan Rakyat namun juga pemilihan Presiden secara langsung melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel serta yang tidak kalah penting adalah keberhasilan untuk mengembalikan militer kepada peran profesionalnya. Kudeta di Myanmar yang dilakukan oleh pihak militer didasarkan pada permasalahan penyelenggaraan pemilu, oleh karena itu Indonesia dapat memberikan masukan mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu maupun terkait dengan penyelesaian permasalahan yang timbul didalamnya. Dimana dalam beberapa pemilu baik pada level daerah, nasional maupun pemilihan presiden berbagai permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur konstitusional.

Pengalaman yang tidak kalah penting adalah bagaimana selama 32 Tahun di masa orde baru militer di Indonesia menguasai panggung politik dari tingkat nasional hingga daerah melalui konsep Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Demokratisasi yang mengemuka juga menuntut mundurnya militer dari politik dan pemerintahan, meskipun hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Namun demikian, melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menjadi tonggak untuk mewujudkan militer profesional yang tidak lagi berada dalam ranah politik. Berdasarkan pengalaman Indonesia dimana militer tidak lagi terlibat dan menarik diri dalam urusan politik yang akan berimplikasi terhadap harapan dari masyarakat sipil agar militer menjalankan peran profesionalnya untuk melindungi rakyat dan negara (Hidriyah, 2021, p. 9). Indonesia dapat membagikan pengalamannya untuk mengembalikan militer kembali pada fungsinya sebagai bagian dari proses demokrasi tanpa ada gejolak yang berdampak terhadap stabilitas politik di dalam negeri. Terlebih bagi pemimpin di Myanmar, Indonesia sebagai yang terdepan dalam demokrasi di ASEAN

telah dijadikan sebagai rujukan untuk membentuk model institusi demokrasi yang baru di negara tersebut (Renshaw, 2013, p. 41).

c. *Kapabilitas Diplomasi Indonesia di ASEAN.*

Kepemimpinan Indonesia dalam bidang politik-keamanan di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari aktivitas yang dijalankan oleh Indonesia dalam berkontribusi pada keamanan dan perdamaian kawasan. Kontribusi ini terwujud dalam peran yang dijalankan untuk senantiasa mengelola berbagai konflik yang mengemuka baik diantara negara anggota ASEAN maupun yang melibatkan negara di luar kawasan. Kapabilitas diplomasi Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan Indonesia dalam menjalankan *shuttle diplomacy* dalam meredakan konflik antara Thailand dan Kamboja (Natalegawa, 2018, p. 34) maupun dengan menginisiasi pertemuan multilateral diantara Menteri Luar Negeri ASEAN dalam rangka membahas permasalahan tersebut (Amador & Teodoro, 2016, p. 12). Demikian pun dengan permasalahan sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang melibatkan Tiongkok sebagai kekuatan eksternal, Indonesia mengedepankan diplomasi melalui forum multilateral dengan tujuan untuk tetap membuka jalur komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam klaim kepemilikan wilayah tersebut (Djalal, 2001; Raharjo, 2014). Disamping itu, Indonesia aktif dalam menjalankan *backdoor diplomacy* dalam rangka menyerap berbagai aspirasi terkait dengan permasalahan LTS tanpa harus mendapatkan sorotan negatif dari pihak lain.

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia baik pada permasalahan antar negara maupun yang terkait dengan permasalahan domestik khususnya di Myanmar, Indonesia telah mengukuhkan peran kepemimpinan di ASEAN dalam bidang politik keamanan. Terkait dengan permasalahan krisis politik di Myanmar akibat kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Syu Ki, Indonesia dapat mengemukakan berbagai inisiatif baik secara langsung terhadap pihak-pihak yang berseberangan di Myanmar maupun melalui

dialog secara multilateral dalam kerangka ASEAN. Indonesia melalui dalam kapasitas menjalankan peran kepemimpinan melakukan shuttle diplomacy ke negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menyusun rencana untuk meredakan krisis politik yang terjadi di Myanmar (CNN Indonesia, 2021). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pendekatan terhadap berbagai pihak di Myanmar dan menemukan titik zona nyaman melalui diplomasi *non-megaphone*. Pada tataran multilateral, Indonesia dapat tetap membuka harapan mengenai perubahan kondisi di Myanmar dalam pertemuan ASEAN pada April 2021 di Jakarta, ditengah pesimisme yang mengemuka seiring dengan prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN akan membuat pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan.

Tantangan Bagi Kepemimpinan Indonesia dalam Penyelesaian Krisis Politik di Myanmar Tahun 2021.

Bagi Indonesia, krisis politik yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer pada awal tahun 2021 tidak hanya menjadi menghadirkan harapan yang berasal dari ASEAN dan negara anggota lain, namun juga tantangan terjadap upaya mengatasinya. Tantangan ini hadir terhadap upaya serta inisiatif yang akan digagas oleh Indonesia dalam mengatasi krisis politik di Myanmar dalam peran kepemimpinan pada bidang politik-keamanan. Tantangan tersebut hadir baik dalam konteks normatif dari ASEAN sendiri terkait dengan prinsip non-intervensi sebagai bagian dari ASEAN Way, resistensi yang mengemuka dari masyarakat Myanmar dan kondisi domestik Indonesia sendiri terkait dengan inkonsistensi dalam penyelesaian permasalahan HAN serta fokus pemerintah Indonesia saat ini yang lebih dominan terhadap konsolidasi politik domestik.

a. ASEAN Ways: Prinsip Non-Interference.

“ASEAN Way” sebagai dasar interaksi antar negara dan menghadapi berbagai permasalahan yang muncul didalamnya. ASEAN Way sendiri

dapat dipahami sebagai norma berperilaku yang terkandung dalam code of conduct dan seperangkat norma prosedural. perilaku informal dan bersahabat yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota ASEAN (Nischalke, 2000, p. 92). Berdasarkan hal tersebut, ASEAN Way merupakan sebuah sistem untuk menghindari konflik yang didasarkan pada negosiasi informal yang lebih fleksibel dimana hal ini berlawanan dengan yang biasa dilakukan dalam mekanisme institusi yang formal. Dengan kata lain ASEAN berusaha untuk menerapkan *soft approach* dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul diantara negara anggota ASEAN. Penjelasan tersebut ASEAN way adalah untuk menggambarkan interaksi yang ada dalam kawasan serta merupakan ciri khas atau kultur yang membedakan dengan mekanisme multilateral lain khususnya yang berkembang di negara Barat.

ASEAN Way sejatinya telah mampu menjadi norma yang membatasi perilaku sesama negara anggota ASEAN untuk tidak terlibat dalam eskalasi konflik yang membawa implikasi terhadap instabilitas kawasan. Meskipun demikian, keberadaan ASEAN Way yang tidak memiliki kelemahan saat dihadapkan pada permasalahan-permasalahan domestik negara anggota yang berpotensi menimbulkan instabilitas pada tataran kawasan. Hal ini merujuk pada ASEAN Way secara tradisional dimaknai sebagai batasan negara anggota ASEAN untuk menghindari diri agar tidak memberikan kritik terhadap sistem maupun praktek politik domestik negara anggotanya demi memelihara keharmonisan hubungan diantara negara anggotanya (Choiruzzad, 2015, p. 47). Dengan demikian maka, permasalahan demokrasi (Ruland, 2021; Tobing, 2016) maupun HAM (Aminuddin & Purnomo, 2017; Rahmanto, 2017) menjadi sesuatu yang tabu untuk disoroti oleh sesama negara anggota ASEAN sehingga membatasi sikap yang akan diberikan. Sejalan dengan Acharya (2001b, p. 57) yang menyatakan bahwa bahwa prinsip non-intervensi menjamin kebebasan dari setiap negara anggota untuk mengatasi permasalahan

dalam negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lain dimana apabila campur tangan tersebut dilakukan maka akan mencederai prinsip kebebasan, kemerdekaan dan integritas suatu negara.

Tantangan bagi Indonesia dalam menyikapi permasalahan yang terkait dengan krisis demokrasi akibat kudeta militer di Myanmar mengemuka dari kesepakatan mengenai prinsip non-intervensi sebagai ruh dari *ASEAN Way*. Keberadaan dari prinsip non-intervensi ini membuat Indonesia memiliki pilihan yang terbatas untuk mengedepankan dan mendorong penyelesaian krisis yang terjadi di Myanmar. Disisi lain Indonesia dalam peran kepemimpinan di ASEAN menuntut untuk mengedepankan *ASEAN Way* serta sentralitas ASEAN, namun disisi lain tuntutan penyelesaian krisis di Myanmar semakin kuat khususnya dari masyarakat internasional. Terlebih tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara ASEAN tidak berada dalam satu suara dalam menyikapi permasalahan krisis politik di Myanmar. Dengan demikian maka, tantangan bagi Indonesia disamping sikap terhadap Myanmar juga terkait menggalang suara bulat dari negara anggota ASEAN untuk mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi. Meskipun bukan pekerjaan mudah, namun tantangan ini akan menguji peran kepemimpinan Indonesia dalam bidang politik-keamanan di ASEAN dalam penyelesaian krisis politik di Myanmar.

b. Penolakan Masyarakat Myanmar.

Indonesia berada dalam posisi dilematis mengingat pihak pro-demokrasi yang diwakili para aktivis meminta pemerintah Indonesia dan ASEAN tidak membuka komunikasi dengan pihak Junta militer yang berkuasa (Bonasir, 2021). Tuntutan tersebut muncul sebagai bagian untuk tidak memberikan legitimasi kepada pihak militer yang diberikan oleh Indonesia maupun negara-negara ASEAN lain. Kondisi ini mempersulit upaya Indonesia untuk membantu mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak, terlebih Indonesia perlu untuk menempatkan diri diantara

kedua belah pihak untuk mendengarkan aspirasi sebagai masukan dalam merumuskan jalan keluar terhadap krisis yang sedang dihadapi. Terlebih dalam penyelenggaraan KTT ASEAN pada April 2021 yang akan dilaksanakan di Jakarta, Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin kudeta hadir mewakili pemerintah Myanmar. Kehadiran pemimpin kudeta ini tentu akan mendapatkan kecaman dari masyarakat Myanmar karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan dan memberikan legitimasi terhadap pemerintahan hasil kudeta.

Tantangan lain kembali mengemuka dari masyarakat Myanmar khususnya terhadap upaya yang tengah dibangun oleh Indonesia dalam merespon krisis yang terjadi di negara mereka. Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar menuntut agar pemerintah Indonesia tidak menjalin komunikasi dengan pihak perwakilan yang menjadi representasi pemerintah militer Myanmar. Tuntutan ini disuarakan sebagai bentuk ketidakberpihakan Indonesia terhadap rakyat Myanmar, karena akan memberikan legitimasi terhadap pemerintahan hasil kudeta dibawah kepemimpinan militer (Pradana, 2021). Kondisi jelas mempersulit posisi Indonesia yang harus senantiasa menjalin komunikasi serta netralitasnya untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan di Myanmar tanpa mengorbankan aspirasi masyarakat Myanmar pada satu sisi serta tetap memegang teguh prinsip non-intervensi terhadap kebijakan rezim berkuasa di sisi lainnya.

Tidak sampai pada permasalahan pemberian legitimasi terhadap pemerintahan militer, masyarakat Myanmar juga melakukan demonstrasi di KBRI Yangon, terkait dengan kabar yang menyebutkan Indonesia tengah menggagas pemilihan umum ulang di Myanmar dengan mengkonsolidasikan dukungan dari negara ASEAN lainnya. Aksi masyarakat Myanmar tersebut terjadi berdasarkan laporan yang dimuat pemberitaan media. Bagi masyarakat Myanmar pemilihan umum ulang

yang difasilitasi oleh pemerintahan militer ini bukan menjadi solusi dan hal ini dianggap merupakan dukungan terhadap eksistensi dari pemerintahan militer. Namun, secara tegas Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri membantah mengagaskan pemilihan umum ulang di Myanmar dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman (Sorongan, 2021).

Berbagai aksi yang ditunjukkan oleh masyarakat Myanmar terhadap upaya yang dilakukan oleh Indonesia merupakan bukti bahwa diperlukan langkah serta pernyataan yang sangat berhati-hati. Langkah ini merujuk pada permasalahan demokratisasi merupakan persoalan sensitif bagi masyarakat di Myanmar, meskipun melibatkan Indonesia yang dianggap sebagai 'sahabat lama' dalam penyelesaian masalah tersebut. Indonesia dalam permasalahan ini dituntut untuk mampu menemukan formulasi langkah yang tepat sehingga tidak menyinggung masyarakat Myanmar maupun pemerintahan militer yang tengah berkuasa pada saat khususnya dalam mengagaskan upaya kolektif melalui mekanisme ASEAN. Kondisi ini perlu diperhatikan secara seksama demi memperoleh jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam rangka mengakhiri krisis politik serta jatuhnya lebih banyak korban jiwa di Myanmar.

c. *Inkonsistensi dalam Masalah HAM dan Konsolidasi Demokrasi Di dalam Negeri.*

Indonesia sebagai negara yang menjadi motor dalam mempromosikan HAM dan demokrasi di ASEAN potensi pelanggaran HAM yang terjadi dalam krisis politik di Myanmar harus segera mendapatkan perhatian, khususnya dengan melalui mekanisme ASEAN. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan HAM pada ranah domestik Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi saat transisi demokrasi tahun 1998, Aceh, Timor Timur (negara Timor Leste saat ini) maupun berbagai kasus yang hingga saat ini belum menemui titik terang (Patra,

2018, p. 199). Disisi lain Indonesia masih menunjukkan keraguan untuk mengimplementasikan instrumen Konvensi Hak Sipil Internasional yang menjadi instrumen kunci dalam jaminan atas HAM Universal yang dimiliki PBB (Eldridge, 2002, p. 137). Kondisi ini jelas akan berdampak terhadap bagaimana Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri terkait dengan HAM (Perwita, 2006). Dimana yang kemudian ditunjukkan oleh Indonesia adalah inkonsistensi dari sikap yang ditunjukkan Indonesia terhadap pelanggaran HAM. Inkonsistensi ini dapat dilihat dari bagaimana sikap Indonesia dalam permasalahan pelanggaran HAM di Myanmar yang terjadi pada tahun sebelumnya. Indonesia tidak secara tegas menunjukkan sikap terhadap Myanmar atas pelanggaran HAM yang terjadi, kondisi ini kontras dengan sikap Filipina yang dengan tegas tidak akan meratifikasi ASEAN Charter apabila pemerintah Myanmar tidak melakukan perbaikan atas perlindungan HAM (Wuryandari, 2008, p. 65).

Tantangan lain yang harus dihadapi Indonesia dalam peran kepemimpinan untuk merespon krisis politik di Myanmar adalah orientasi politik luar negeri yang saat ini dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Orientasi tersebut didasarkan pada kondisi domestik yang dihadapi Indonesia yang tidak lagi memiliki energi penuh dalam rangka menjalankan kepemimpinan di ASEAN. Kondisi yang sama seperti yang pernah dialami pada awal era reformasi dimana Indonesia harus menghadapi dengan krisis ekonomi sekaligus krisis politik di dalam negeri (Darwis, 2019; Rattanasevee, 2014). Dengan demikian Presiden Joko Widodo membawa Indonesia untuk berfokus pada usaha untuk melakukan konsolidasi politik domestik. Kondisi ini menjadikan pemerintah Indonesia lebih *inward-looking* dengan menampilkan politik luar negeri yang low profile dengan tidak terlalu banyak menjalankan peran internasionalnya sehingga fokus terhadap urusan dalam negeri yang bertujuan untuk membenahi dan memperkuat kondisi dan stabilitas dalam negeri (Situmorang, 2015).

Konsekuensi dari orientasi inward-looking membuat Indonesia kemudian menjalankan politik luar negeri yang bertujuan untuk mencapai berbagai kepentingan domestik khususnya pada isu-isu ekonomi yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian maka, kebijakan luar negeri yang diusung oleh pemerintah Indonesia tidak lagi berorientasi pada permasalahan politik-keamanan namun lebih kepada isu-isu ekonomi, meskipun dalam konteks kawasan Indonesia secara alami tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini. Namun meskipun demikian, Presiden Joko Widodo mendelegasikan permasalahan politik-keamanan dalam konteks internasional pada kementerian terkait, khususnya kementerian luar negeri maupun kementerian pertahanan (Widiatmaja & Albab, 2019, p. 86).

Merespon krisis politik yang terjadi di Myanmar pemerintah Indonesia mendelegasikan Kementerian luar negeri dengan menteri luar negeri Retno Marsudi sebagai ujung tombaknya. Berbeda dengan era Presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang secara langsung terlibat dalam penyelesaian permasalahan Myanmar terkait dengan kedekatan dengan penguasa militer Myanmar pada masa tersebut. Meskipun berbeda situasi dan kondisi yang dihadapi namun, keterlibatan secara langsung pemimpin negara akan memberikan dampak yang berbeda terhadap upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam keterlibatannya pada permasalahan politik-keamanan di Asia Tenggara. Namun berdasarkan kondisi dalam negeri yang tengah dihadapi oleh Indonesia saat ini, keterlibatan Indonesia dalam mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar tidak akan menjadi prioritas karena harus membagi konsentrasi terhadap permasalahan politik domestik dan pembangunan ekonomi disatu sisi serta permasalahan Myanmar sebagai isu di kawasan pada sisi lainnya.

KESIMPULAN

Krisis politik yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer pada awal tahun 2021 terhadap pemerintahan Aung San Su Kyi telah memunculkan kekhawatiran atas proses demokrasi yang selama ini dipromosikan oleh ASEAN dan Indonesia. Disamping itu permasalahan krisis politik di Myanmar berpotensi untuk mengundang campur tangan negara luar melalui berbagai tekanan baik ekonomi maupun politik yang akan membahayakan soliditas ASEAN. Harapan dalam mengatasi krisis politik di Myanmar tertuju pada Indonesia yang selama ini diakui kepemimpinan dalam bidang politik-keamanan oleh negara anggota ASEAN serta keberhasilan pendekatan yang selama dilakukan terhadap pemerintah Myanmar. Harapan ini muncul seiring dengan politik bebas aktif, pengalaman dalam transisi demokrasi serta kapabilitas diplomasi yang dimiliki. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam permasalahan krisis politik di Myanmar memunculkan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam membantu mendorong mengatasi krisis tersebut yang datang dari ASEAN Way, penolakan masyarakat Myanmar terkait dengan wacana Indonesia serta konsolidasi demokrasi serta inkonsistensi dalam masalah HAM di dalam negeri Indonesia. Harapan dan tantangan yang dihadapi Indonesia ini tentu bukan alasan untuk tidak berupaya mengatasi krisis politik yang terjadi di Myanmar. Terkait dengan permasalahan demokratisasi dan HAM di negara tersebut, Indonesia dapat mengedepankan *constructive engagement* yang dirasakan efektif dalam mendorong proses demokrasi dan HAM di Myanmar kearah yang lebih baik. Pada krisis yang terjadi saat ini, *constructive engagement* masih menjadi pilihan bagi Indonesia untuk tetap mengedepankan ASEAN dengan menggalang solidaritas negara anggota lain dalam menyatukan pandangan mengagas inisiatif dalam mengatasi krisis politik yang dialami oleh Myanmar. Keberadaan *constructive engagement* sebagai pendekatan Indonesia dalam menanggapi krisis politik di Myanmar dapat digunakan untuk memotret lebih detail mengenai peran bidang politik-keamanan Indonesia di ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001a). Constructing a Security Community in Southeast Asia. In *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9781315796673>
- Acharya, A. (2001b). *Constructing Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Leadership*. Routledge.
- Acharya, A. (2012). *ASEAN and Burma/Myanmar Past and Prologue* (Policy Brief). https://www.risingpowersinitiative.org/wp-content/uploads/policybrief_apr2012_aseanmyanmar.pdf
- Amador, J., & Teodoro, J. (2016). The role of the Association of Southeast Asian Nations in post-conflict reconstruction and democracy support. In *International IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance*.
- Aminuddin, M. F., & Purnomo, J. (2017). Redefining ASEAN Way: Democratization and Intergovernmental Relations in Southeast Asia. *Journal of ASEAN Studies*, 5(1), 23–36.
- Anwar, D. F. (1994). *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism*. Institute of Southeast Asia Studies.
- Anwar, D. F. (1997). ASEAN and Indonesia: Some reflections. *Asian Journal of Political Science*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.1080/02185379708434092>
- Anwar, D. F. (2018). Indonesia's vision of regional order in East Asia amid U.S.-China rivalry: Continuity and change. *Asia Policy*, 13(2), 57–63. <https://doi.org/10.1353/asp.2018.0024>
- Aryani, N. S. P. (2019). Constructive Engagement as Indonesia's Foreign Policy Strategy in Promoting Democratization in Myanmar. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 1–14.
- B. Roberts, C., D. Habir, A., C. Sebastian, L., & Sambhi, N. (2015). *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1355/cs37-3m>
- bbc. (2021). *Myanmar Coup: US announces sanction on leaders*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-56015749>
- Bonasir, R. (2021). *Kudeta Myanmar: Membandingkan Taktik Pembangkangan Sipil ala Myanmar dengan Demo 1998 di Indonesia*. Bbc.Com.
- C. Sebastian, L. (2014). Indonesia's Dynamic Equilibrium and ASEAN Centrality. *Prospect of Multilateral Cooperation in the Asia Pacific: To*

Overcome the Gap of Security, 9–24.

- Caballero-Anthony, M. (2005). *Regional security in Southeast Asia*. ISEAS. <https://doi.org/10.5040/9780755622382.ch-006>
- Choiruzzad, S. A. B. (2015). *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi dan Integrasi Ekonomi*. Yayasan Obor Indonesia.
- CNN Indonesia. (2021). *Di Balik Diplomasi “Pasif” RI Bantu Tangani Krisis Myanmar*. Cnnindonesia.Com.
- Darwis. (2019). *Indonesia & ASEAN: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi*. UNHAS Press.
- Dewi, R. (2013). Dispute Settlement of the Thailand – Cambodia Border (Case : Dispute over Preah Vihear. *SWP Conference Diskussion Paper*, 1–15. http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2013_Rosita_Dewi.pdf
- Direktorat Kerja Sama ASEAN. (2014). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2014-2019*.
- Djalal, H. (2001). Indonesia and the South China Sea initiative. *Ocean Development and International Law*, 32(2), 97–103. <https://doi.org/10.1080/00908320151100226>
- Eldridge, P. (2002). Human Right in Post-Suharto Indonesia. *The Brown Journal of World Affairs*, 9(1), 127–139.
- Emmers, R. (2014). Indonesia’s role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership. *Pacific Review*, 27(4), 543–562. <https://doi.org/10.1080/09512748.2014.924230>
- Fathun, L. M. (2018). Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. *Islamic World and Politics*, 2(2), 317–334.
- Haacke, J. (2002). *ASEAN’s Diplomatic and Security Culture Origins, Development and Prospect*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203037539>
- Hidriyah, S. (2021). Krisis Politik Myanmar dan Intervensi ASEAN. *Info Singkat*, 13(6), 7–12.
- Holsti, K. . (1970). National Role Conception in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233–309.
- Holsti, K. . (1995). *International Politics: A Framework For Analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- Lee, Y. N. (2021). *China’s “Laissez-Faire” approach toward Myanmar’s Coup*

puts its own interest at risk, says analyst. CNBC.
<https://www.cnbc.com/2021/04/05/myanmar-coup-chinas-non-interference-could-hurt-china-says-analyst.html>

Leifer, M. (1989). *ASEAN and the Security of South-East Asia*. Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203504505>

Liow, J. C., & Emmers, R. (2005). Order and security in Southeast Asia: Essays in memory of Michael Leifer. *Order and Security in Southeast Asia: Essays in Memory of Michael Leifer*, 1–244.
<https://doi.org/10.4324/9780203014813>

Luhulima, C. P. F. (2010). *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Pustaka Pelajar.

Natalegawa, M. (2018). *Does ASEAN Matter? A View From Inside*. ISEAS.

Nischalke, T. I. (2000). Insights from ASEAN's Foreign Policy Co operation: The "ASEAN Way", a Real Spirit or a Phantom? *Contemporary Southeast Asia*, 22(1), 89–112. https://doi.org/10.1355/cs22_1d

Patra, R. (2018). The Failure of Settlement of Human Right Violation in Indonesia and its Solution. *Yustisia*, 7(1), 197–215.

Perwita, A. A. B. (2006). Penegakan HAM dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(2), 112–121.

Pradana, A. (2021). *Demo di Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar: "Tolong Kami Mengembalikan Demokrasi."* Bbc.Com.

Putra, B. A. (2015). Indonesia'S Leadership Role in Asean: History and Future Prospects. *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 1(2), 188. <https://doi.org/10.18769/ijasos.82584>

Raharjo, S. N. I. (2014). Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 55–70.

Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi bagi ASEAN ditinjau dari Perspektif Hak Azasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145–149.

Rattanasevee, P. (2014). Leadership in ASEAN: The Role of Indonesia Reconsidered. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 113–127. <https://doi.org/10.1080/02185377.2014.895912>

Renshaw, C. S. (2013). Democratic Transformation and Regional Institutions: The Case of Myanmar and ASEAN. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(1), 29–54.

Ruland, J. (2021). Policymaking, Democratic Backsliding Regional Governance and Foreign Policymaking in Southeast Asia: ASEAN, Indonesia and The

Philippines. *Democratization*, 28(1), 237–257.

- Ryu, Y., Minn, B., & Mon, M. M. (2021). *The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise ASEAN Centrality and Communal Value* (No. 27; Perspective). https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/02/ISEAS_Perspective_2021_27.pdf
- Sari, S. (2019). Peran Indonesia dalam Implementasi ASEAN Political Security Community. *Jurnal Dinamika Global*, 4(1), 18-61. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/100/86>
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1), 67–85.
- Smith, A. (2016). *Indonesia 's The End Role in ASEAN: of Leadership?* 21(2), 238–260.
- Sorongon, T. P. (2021). *Pendemo Myanmar Serbu Kedubes RI, ini Penyebabnya*. Cnbcindonesia.Com.
- Thompson, S. (2015). Leadership and Dependency: Indonesia's Regional and Global Role, 1945-75. In C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian (Eds.), *Indonesia's Ascent Power, Leadership and The Regional Order* (pp. 22–39). Palgrave Macmillan.
- Tobing, D. H. (2016). The Limit and Possibilities of the ASEAN Way: The Case of Rohingya as Humanitarian Issue in Southeast Asia. *The 1st International Conference on Southeast Asia Studies*, 146–174.
- Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional. *Politica*, 10(1), 77–93. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1313/723>
- Widiyanta, D., Djumarwan, & Hartono, M. (2016). Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Demokratisasi ASEAN 1998-2010. *Mozaik*, 8(1), 31–48.
- Wuryandari, G. (2008). Politik Luar Negeri Indonesia : Refleksi dan Prediksi 10 Tahun. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 59–72. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/503/312>
- Yani, YM. & Montratama, I. (2018). Indonesia and ASEAN in 2025: A Political and Security Perspective. *Jurnal Dinamika Global*, 3(2), 137. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/79/66>